



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

BAN PT No. 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Luar Negeri
Indonesia Era SBY dan Era Jokowi Dengan Perdagangan
Bilateral Indonesia-Turki (2004 - 2019)**

Skripsi

Oleh

Saskia Indrawati

2016330052

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

BAN PT No. 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Luar Negeri
Indonesia Era SBY dan Era Jokowi Dengan Perdagangan
Bilateral Indonesia-Turki (2004 - 2019)**

Skripsi

Oleh

Saskia Indrawati

2016330052

Pembimbing

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan
Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Saskia Indrawati
Nomor Pokok : 2016330052
Judul : Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Era SBY dan Era Jokowi Dengan Perdagangan Bilateral Indonesia-Turki (2004-2019)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 29 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

: 

Sekretaris

Giandi Kartasasmita, S.IP., MA

: 

Anggota

Dr. Adélburtus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saskia Indrawati

NPM : 2016330052

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Luar Negeri
Indonesia Era SBY dan Era Jokowi Dengan Perdagangan
Bilateral Indonesia-Turki (2004 - 2019)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah saya sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 29 Juni 2020

A yellow revenue stamp from the Indonesian Ministry of Finance (KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'. A handwritten signature is written over the stamp.

Saskia Indrawati

ABSTRAK

Nama : Saskia Indrawati
NPM : 2016330052
Judul : Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia Era SBY dan Era Jokowi Dengan Perdagangan Bilateral Indonesia-Turki (2004 - 2019).

Hubungan bilateral Indonesia dan Turki sudah terjalin sejak tahun 1950. Kedua negara ini berkeinginan kuat untuk dapat menjadi unggul dalam hubungan bilateral melalui kerjasama praktis yang berkelanjutan dalam bidang yang lebih luas dan membangun kemitraan yang berwawasan ke depan. Kedua negara juga berjanji untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi dan membangun sinergi antar negara. Salah satu tolak ukur yang dengan mudah dapat dilihat dari hubungan kedua negara yang saling mengalami kemajuan ini, diukur dari nilai perdagangan yang dicapai oleh kedua negara. Hubungan kedua negara ini juga dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia, maka dari itu penelitian ini akan menjelaskan apa saja pengaruh dari kebijakan ekonomi luar negeri era SBY dan era Jokowi terhadap ekspor dan impor Indonesia-Turki pada tahun 2004 sampai dengan 2019. Dalam menjawab pertanyaan penelitian **“Bagaimana dampak kebijakan ekonomi luar negeri antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo terhadap kegiatan ekspor serta impor Indonesia-Turki?”** Penulis menganalisa penelitian ini dengan menggunakan teori perdagangan internasional dan teori liberalisme untuk memahami kerjasama dagang antara Indonesia dan Turki. Untuk mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian analisis wacana kualitatif dengan menggunakan studi dokumen sebagai sumber data. Data yang didapat dan dianalisis akan menghasilkan jawaban dari rumusan masalah, yaitu menjelaskan pengaruh kebijakan ekonomi luar negeri SBY dan Jokowi terhadap ekspor dan impor Indonesia-Turki serta melihat kelebihan dan kekurangan dari kebijakan ekonomi luar negeri SBY maupun Jokowi yang mempengaruhi kerjasama dagang Indonesia dan Turki.

Kata Kunci : Hubungan Bilateral, SBY, Jokowi, Indonesia, Turki, Ekspor, Impor, Perdagangan Internasional, Kerjasama Dagang, Kebijakan Ekonomi Luar Negeri.

ABSTRACT

Nama : Saskia Indrawati
NPM : 2016330052
Judul : Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia Era SBY dan Era Jokowi Dengan Perdagangan Bilateral Indonesia-Turki (2004 - 2019).

Bilateral relations between Indonesia and Turkey have been established since 1950. Both countries have a strong desire to be able to excel in bilateral relations through sustainable practical cooperation in the broader field and building forward-looking partnerships. The two countries also promised to continue to improve economic relations and build synergies between countries. One of the benchmarks can easily be seen from the relations between the two countries that are progressing with each other, measured from the value of trade that is achieved by the two countries. The relations between the two countries are also influenced by Indonesia's foreign economic policy, therefore this research will explain what are the effects of SBY and Jokowi era on foreign-Indonesian exports and imports from 2004 to 2019. In answering the research question "What is the effect of foreign economic policy between Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo on Indonesian-Turkish export and import activities?" The author analyzes this research by using the theory of international trade and the theory of liberalism to understand trade cooperation between Indonesia and Turkey. To support the answers to research questions, the authors use the qualitative discourse analysis research method using study documents as a source of data. The data obtained and analyzed will produce answers to the formulation of the problem, namely explaining the influence of SBY and Jokowi's foreign economic policies on Indonesia-Turkey exports and imports as well as looking at the advantages and disadvantages of SBY and Jokowi's foreign economic policies that affect Indonesian and Turkish trade cooperation.

Key Words : Bilateral Relations, SBY, Jokowi, Indonesia, Turkey, Exports, Imports, International Trade, Trade Cooperation, Foreign Economic Policies.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia Era SBY dan Era Jokowi Dengan Perdagangan Bilateral Indonesia-Turki (2004 - 2019)**. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Giandi Kartasasmita, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arah dan masukan kepada saya dalam menyusun penelitian ini.

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gelar akademik Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangsih bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, pemberian kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat membantu dan sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Bandung, 29 Juni 2020

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Tidak lupa juga kepada Mama dan Almarhum Papa saya yang selalu memberikan cinta kasih dan pengorbanan yang tiada henti sehingga selalu mengingatkan serta memberikan saya semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat memperoleh hasil yang terbaik, dan keluarga besar saya yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepada saya. Kepada dosen pembimbing saya yaitu Mas Giandi, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah membantu serta membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik. Terima kasih atas ilmu dan masukan yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini.

Banyak sekali nama dibalik proses skripsi ini yang mungkin terlewatkan oleh saya, namun beberapa nama ini yang selalu saya ingat karena dukungan mereka yang terus diberikan kepada saya baik selama hidup saya ini, selama masa kuliah maupun saat proses pengerjaan skripsi dari awal hingga selesai. Pertama, kepada Reyhan Ilyasa terima kasih sudah menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesai dan selalu mendengarkan keluh kesah saya dan terus berusaha untuk membuat saya bahagia serta terima kasih juga untuk segala dukungan dan semangat yang telah diberikan selama ini. Kepada teman terdekat saya di Bandung Larasati Ayuning Sekar dan Popie Putri, terima kasih sudah menemani hari-hari saya selama di Bandung dan selalu mendengarkan

cerita-cerita saya mengenai apapun itu. Terima kasih juga karena selalu memberikan dukungan kepada saya dalam hal apapun itu terutama untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Kepada teman dekat saya sejak awal kuliah hingga saat ini, Deyang Husnah, Loemongga Irene, Dyankaputri Fadhillah, Christ Moudy, Syifa Maisyura, dan Teresa Gabriella, terima kasih telah meluangkan waktu untuk selalu menemani dan selalu mendengarkan keluh kesah saya selama ini dan terus memberikan dukungan kepada saya sejak awal masa kuliah hingga sekarang pada akhirnya saya sudah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kepada teman dekat saya sejak SMA yaitu Clarisa Fiona, Vianney Gisca dan Ruth Theresa, terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya hingga saat ini, yang tidak lupa untuk terus memberikan semangat kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa juga, kepada Cindy Cynthianita sebagai salah satu teman seperjuangan bimbingan Mas Giandi, terima kasih sudah banyak membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai dan terima kasih juga untuk segala dukungannya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK..... | i |
| ABSTRACT..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | ix |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 7 |
| 1.2.1 Deskripsi Masalah..... | 7 |
| 1.2.2 Pembatasan Masalah..... | 11 |
| 1.2.3 Perumusan Masalah..... | 12 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 13 |
| 1.4 Kajian Literatur..... | 13 |
| 1.5 Kerangka Pemikiran..... | 16 |
| 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data..... | 24 |
| 1.7 Sistematika Pembahasan..... | 25 |
| BAB II..... | 27 |

| | |
|---|------------|
| KEBIJAKAN EKONOMI LUAR NEGERI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN JOKO WIDODO PADA TAHUN 2004-2019..... | 27 |
| 2.1 Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Era Susilo Bambang Yudhoyono..... | 28 |
| 2.2 Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Era Joko Widodo..... | 56 |
| BAB III..... | 71 |
| ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN EKONOMI LUAR NEGERI ERA SBY DAN JOKOWI DENGAN KEGIATAN EKSPOR-IMPOR INDONESIA DAN TURKI (2014-2019)..... | 71 |
| 3.1 Keterkaitan Kebijakan Ekonomi Luar Negeri SBY Terhadap Ekspor-Import Indonesia dan Turki..... | 71 |
| 3.2 Keterkaitan Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Jokowi Terhadap Ekspor-Import Indonesia dan Turki..... | 86 |
| 3.3 Perbandingan Perdagangan Ekspor dan Import Indonesia-Turki Era SBY dan Jokowi..... | 98 |
| BAB IV..... | 104 |
| KESIMPULAN..... | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 106 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----|--|----|
| 2.1 | Tabel Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2010 - 2014..... | 45 |
| 3.1 | Tabel Indeks Intensitas Perdagangan Bilateral..... | 80 |
| 3.2 | Tabel Perdagangan Indonesia dan Turki..... | 97 |

DAFTAR SINGKATAN

| | | |
|---------|---|---|
| OIC | : | Organization of Islamic Conference |
| D8 | : | Developing-8 |
| FKB | : | Forum Konsultasi Bilateral |
| GDP | : | Gross Domestic Product |
| CETP | : | Comprehensive Economic Trade Partnership |
| USD | : | United States Dollars |
| FDI | : | Foreign Direct Investment |
| OECD | : | Organisation for Economic Co-operation and Development |
| AS | : | Amerika Serikat |
| RI | : | Republik Indonesia |
| IT-CEPA | : | Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement |
| SBY | : | Susilo Bambang Yudhoyono |
| JOKOWI | : | Joko Widodo |
| ASEAN | : | Association of Southeast Asian Nations |
| AFTA | : | ASEAN Free Trade Area |
| MEA | : | Masyarakat Ekonomi ASEAN |
| ECSC | : | European Coal and Steel Community |
| MFN | : | Most Favored Nations |

| | | |
|-------|---|--|
| RPJPN | : | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional |
| RPJMN | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| UMKM | : | Usaha Mikro, Kecil, Menengah |
| BUMN | : | Badan Usaha Milik Negara |
| IPTEK | : | Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| APBN | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| APEC | : | Asia-Pacific Economic Cooperation |
| TNI | : | Tentara Nasional Indonesia |
| MDGs | : | Millenium Development Goals |
| RUU | : | Rancangan Undang-undang |
| UKM | : | Usaha Kecil Menengah |
| SNI | : | Standar Nasional Indonesia |
| ITPC | : | Indonesia Trade Promotion Center |
| WTO | : | World Trade Organization |
| ASEM | : | Asia-Europe Meeting |
| SDM | : | Sumber Daya Manusia |
| KEK | : | Kawasan Ekonomi Khusus |
| G20 | : | Group of Twenty |
| JCM | : | Joint Commission Meeting |
| MoU | : | Memorandum of Understanding |
| BPPT | : | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |

| | | |
|--------|---|---|
| NAFED | : | National Agency for Export Development |
| IGEME | : | Indonesia and Export Promotion Center of Turkey |
| WNI | : | Warga Negara Indonesia |
| BHI | : | Badan Hukum Indonesia |
| PTA | : | Preferential Tariff Agreement |
| FTA | : | Free Trade Agreement |
| CEPA | : | Comprehensive Economic Partnership |
| RCEP | : | Regional Comprehensive Economic Partnership |
| HAKI | : | Hak Kekayaan Intelektual |
| MOI | : | Mainstreaming Ocean-related Issues |
| IKM | : | Industri Kecil Menengah |
| DNI | : | Daftar Negatif Investasi |
| INSW | : | Indonesia National Single Window |
| UNCTAD | : | United Nations Conference on Trade and Development |
| GCI | : | Global Competitiveness Index |
| WEF | : | World Economic Forum |
| BKPM | : | Badan Koordinasi Penanaman Modal |
| AEC | : | ASEAN Economic Community |
| TTI | : | Trade, Tourism, Investment |
| PMA | : | Penanaman Modal Asing |
| TUSKON | : | Turkish Confederation of Businessmen and Industrialists |

| | | |
|-------|---|--------------------------------------|
| OIC | : | Organisation of Islamic Cooperation |
| PBB | : | Perserikatan Bangsa Bangsa |
| SSM | : | Sekretariat Industri Pertahanan |
| KADIN | : | Kamar Dagang dan Industri Indonesia |
| IIF | : | Izmir International Fair |
| KJRI | : | Konsulat Jenderal Republik Indonesia |
| ToR | : | Terms of References |
| CTF | : | Customs and Trade Facilitation |
| TR | : | Trade Remedies |
| SPS | : | Sanitary and Phytosanitary |
| TKI | : | Tenaga Kerja Indonesia |
| HAM | : | Hak Asasi Manusia |
| RAM | : | Rational Action Model |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia internasional yang semakin kompleks dan tingkat ketergantungan antar negara yang semakin tinggi, menjadikan pilihan bagi setiap negara untuk mengembangkan dan memperluas hubungannya dengan negara lain untuk menjalin kerjasama internasional dengan mengacu kepada kepentingan nasional masing-masing negara. Dengan adanya hubungan antar kedua negara ini akan menghasilkan sebuah kerjasama bilateral yang dapat meningkatkan hubungan kemitraan yang kuat dengan negara lain dengan tujuan untuk dapat mencapai kepentingan nasional kedua negara baik dari sisi ekonomi, politik, maupun sosial. Karena pada dasarnya sebuah negara tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dan menjalin hubungan kerjasama dengan negara lainnya.

Kerjasama bilateral juga mengacu pada aktivitas kerjasama yang didukung secara langsung oleh negara maju dengan negara berkembang. Kerjasama ini berkaitan dengan kebijakan luar negeri sebuah negara yang digunakan untuk memperkuat hubungan bilateral antar negara.¹ Hubungan bilateral antar negara mengarah kepada bidang politik, ekonomi budaya dan ikatan sejarah, serta

¹ “*Bilateral vs Multilateral Cooperation*” 12 Oktober 2016,
<http://one-europe.net/bilateral-vs-multilateral-cooperation>, diakses pada 9 September 2019.

hubungan antar individu. Hubungan bilateral yang kuat ditunjukkan dari adanya kerjasama antar institusi dan perorangan pada tingkat administrasi dan politik serta di sektor swasta, akademisi dan masyarakat sipil. Unsur-unsur bilateral yang lainnya ialah hubungan meliputi perdagangan, investasi, kerjasama budaya, serta pengetahuan umum, pemahaman dan kesadaran publik tentang negara-negara lain dan hubungan dengan negara tersebut.²

Hubungan bilateral dapat berupa hubungan dagang antara satu negara dengan negara yang lain. Bilateral dagang ini dapat dikatakan sebagai sebuah pertukaran barang antara 2 negara untuk mempromosikan mengenai perdagangan dan investasi. 2 negara ini akan berusaha untuk dapat menurunkan dan menghilangkan tarif kuota impor, pembatasan ekspor dan pembatasan perdagangan lainnya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara. Tujuan dari kesepakatan perdagangan bilateral adalah untuk memperluas akses pasar antar 2 negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Operasi bisnis standar pada hubungan bilateral ini dapat mencegah satu negara yang akan berkemungkinan untuk mencuri produk inovatif negara lain, melakukan dumping dengan biaya yang rendah, dan melakukan subsidi barang yang tidak adil. Kesepakatan perdagangan bilateral memiliki peraturan mengenai perdagangan, standar tenaga kerja, dan perlindungan lingkungan.³

² “*Bilateral Guideline: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2014-2021*”, *Financial Mechanism Committee*, 9 Februari 2017, <https://www.norwaygrants.si/wp-content/uploads/BilateralGuideline-2014-2021.pdf>, diakses pada 9 September 2019.

³ Kagan, Julian. “*Bilateral Trade*” 24 Mei 2019, <https://www.investopedia.com/terms/b/bilateral-trade.asp>, diakses pada 9 September 2019.

Hubungan bilateral atau diplomasi bilateral merupakan suatu mekanisme yang penting dalam membangun hubungan kerjasama antar negara yang baik. Diplomasi bilateral yang dijalankan oleh Indonesia dapat memberikan hasil capaian yang positif dalam kerjasama di berbagai bidang, yaitu ekonomi dan perdagangan, pariwisata, lingkungan hidup, pendidikan, transportasi, dan bidang lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain seperti dengan negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa ini terjalin dengan baik dan semakin kuat, dengan menghasilkan dampak dan kontribusi yang positif bagi kemajuan Indonesia dan juga bagi kemajuan kerjasama dalam cakupan regional dan internasional.⁴

Dalam hubungan internasional, antar negara saling memiliki ketergantungan secara ekonomi. Konsumen dan produsen bergantung pada kegiatan ekonomi di luar negeri jika ketergantungan ekonomi tinggi. Suatu negara rentan ketika tidak memiliki alternatif untuk berdagang dengan negara lain. Dalam kerjasama bilateral yang melibatkan dua negara, adanya kerjasama antara produsen yang efisien dengan yang tidak efisien akan mempengaruhi kesejahteraan antar negara yang dapat hancur akibat ketidakseimbangan antara

⁴ “Rencana Strategis 2015-2019”, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTlWTHVhciUyME5lZ2VyaS9SZW5jYW5hJTlWU3RyYXRlZ2lZJTlWS2VtbHUIjAyaMDU1LTlWMTkucGRm> hal. 3-4 diakses pada 12 Juni 2020.

kedua negara. Perdagangan bilateral dapat membantu suatu negara pada masa krisis.⁵

Program serta kegiatan politik luar negeri Indonesia yang menjadi fokus serta prioritas guna meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral antara lain meliputi kegiatan Kepala Negara/ Pemerintahan yang saling mengunjungi negara yang bermitra, saling memberikan dukungan terhadap posisi negara dalam berbagai pertemuan, berperan pro-aktif untuk mengedepankan inisiatif dalam perdamaian dan kemajuan di kawasan. Selain itu, fokus pada program prioritas ataupun kegiatan politik luar negeri Indonesia lainnya adalah meningkatkan diplomasi ekonomi dengan mengoptimalkan berbagai kerjasama kemitraan yang strategis yang terbentuk dengan berbagai negara di dunia dan perluasan pasar tradisional maupun non-tradisional serta melakukan upaya-upaya untuk peningkatan koordinasi para lembaga maupun kementerian yang terkait dalam mengoptimalkan implementasi berbagai kesepakatan yang telah disetujui oleh negara-negara dalam tataran dunia internasional.⁶

Kerjasama bilateral tentunya berlaku bagi Indonesia dengan Turki. Hubungan antar kedua negara ini telah terjalin sejak awal masa kerajaan atau kesultanan di Aceh. Awal mula hubungan antara Indonesia dan Turki ini bermula

⁵ “Indonesia dan Turki”, KBRI Ankara, <https://kemlu.go.id/ankara/id/read/indonesia-turki/51/etc-menu>, diakses pada 10 September 2019.

⁶ “Rencana Strategis 2015-2019”, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0t1bWVudGVyaWFuJTlwTHVhciUyME5lZ2VyaS9SZW5jYW5hJTlwU3RyYXRlZ2l2JTlwS2VtbHUIMjAyMDU1LTIwMTkucGRm> hal. 3-4 diakses pada 12 Juni 2020.

di abad ke-16 dan 19. Dibuktikan dari adanya catatan resmi dalam *Muhimme Records* yang dikeluarkan oleh Divan-i Humayun (Pemerintah Ottoman) yang menyatakan adanya kedatangan utusan dari Aceh ke Istanbul dengan maksud untuk meminta bantuan militer dari Turki serta persiapan kampanye militer ke Sumatera untuk mendukung Aceh dalam melawan penjajah pada tahun 1567. Hubungan antar kedua negara ini di abad ke-19, ditandai dari adanya kedatangan delegasi Aceh ke Istanbul pada tahun 1851-1873. Delegasi Aceh ini berasal dari berbagai kantor pemerintah dengan tujuan utama datang ke Istanbul untuk melakukan pembaharuan kompromi kesetiaan abad ke-16 dan permintaan perlindungan terhadap Aceh dari Kekaisaran Ottoman. Kehadiran orang-orang Turki di wilayah itu juga telah dicatat oleh pengembara bernama Ibnu Battuta yang berasal dari Afrika Utara. Beliau menyebutkan bahwa tradisi negara kesultanan di Aceh mirip dengan tradisi Kesultanan Turki Delhi di India.⁷

Turki memberikan pengakuan diplomatik terhadap Indonesia pada tanggal 29 Desember 1949 dan hubungan bilateral Indonesia dan Turki secara resmi dibuka pada tahun 1950 dengan dicanangkannya Kemitraan Strategis RI-Turki dengan penandatanganan deklarasi "*Indonesia-Turkey: Towards an Enhanced Partnership in a new World Setting*" pada tahun 2011. Indonesia baru membuka Kedutaan Besar RI di Ankara pada tahun 1958. Selain persamaan yang telah disampaikan sebelumnya, Indonesia dan Turki juga tergabung sebagai anggota dalam *Organization of Islamic Conference* (OIC) dan anggota Organisasi Delapan

⁷ "Indonesia dan Turki", KBRI Ankara, <https://kemlu.go.id/ankara/id/read/indonesia-turki/51/etc-menu>, diakses pada 10 September 2019.

Negara Berkembang dengan penduduk bermayoritaskan beragama Islam (D8). Kedua negara ini juga mempunyai visi kebijakan luar negeri yang sama. Kebijakan luar negeri Turki didasarkan pada ajaran Kemal Ataturk yaitu *Peace at Home, Peace in the World*. Sementara, kebijakan luar negeri Indonesia didasari oleh satu tujuan yaitu ‘Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi’.⁸

Persamaan antara kedua negara tersebut dalam perjalanannya memberikan kontribusi untuk mengembangkan hubungan kedua negara. Hubungan Indonesia dengan Turki yang menjadi contoh baiknya hubungan kedua negara ini adalah dengan adanya kunjungan Perdana Menteri Turki Erdogan ke Indonesia pada bulan Februari tahun 2005 setelah terjadinya tsunami di Aceh. Turki memberikan bantuan akibat tsunami berupa bantuan dana sebesar US\$ 600.000 serta mengirimkan tenaga bantuan yang menjadi sukarelawan di Aceh. Dalam pertemuan antara Perdana Menteri Erdogan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk Forum Konsultasi Bilateral (FKB) pada tingkat menteri luar negeri. Kesepakatan ini akan dijadikan sebagai forum untuk melakukan dialog politik secara reguler sekaligus untuk membuka peluang bagi kedua negara untuk membahas isu yang menjadi kepentingan kedua negara.⁹

⁸ *ibid.*

⁹ Marsudi, Retno. “Masa Depan Hubungan Turki Indonesia” Media Indonesia, 28 Oktober 2005. <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F3181/Masa%20depan-MI.htm> diakses pada 10 September 2019.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki sangat baik dan erat. Hal ini terbukti dengan adanya pertemuan rutin dan adanya interaksi antara para pemimpin, menteri, dan pejabat pemerintah, politisi, akademisi dan mahasiswa, serta para pelaku bisnis yang cukup intensif antara Indonesia dengan Turki. Kedua negara ini telah menegaskan untuk kembali berkeinginan kuat untuk dapat menjadi unggul dalam hubungan bilateral melalui kerjasama praktis yang berkelanjutan dalam bidang yang lebih luas dan membangun kemitraan berwawasan ke depan. Kedua negara juga berjanji untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi dan membangun sinergi antar negara.¹⁰

Indonesia dan Turki saling menunjukkan keinginan yang kuat untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Dasar kerja sama bilateral telah cukup dimiliki oleh kedua negara. Salah satu tolak ukur yang dengan mudah dapat dilihat dari hubungan kedua negara yang saling mengalami kemajuan ini, diukur dari nilai perdagangan yang dicapai oleh kedua negara tersebut. Hal tersebut menandakan bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan Turki yang terus membaik, dan dibuktikan dari adanya peningkatan hubungan dagang antar kedua negara. Pada tahun 2004 pada awal masa Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden Indonesia, hubungan dagang antara Indonesia dengan Turki ini

¹⁰ "Indonesia dan Turki", KBRI Ankara, <https://kemlu.go.id/ankara/id/read/indonesia-turki/51/etc-menu>, diakses pada 10 September 2019.

terbilang baik, karena dibuktikan dari adanya peningkatan pada GDP (*Gross Domestic Product*) masing-masing negara. Hubungan bilateral antara kedua negara dalam bidang ekonomi dilakukan secara intensif. Selain itu, hubungan Indonesia dengan Turki pada masa kepemimpinan Joko Widodo sejak tahun 2014 hingga saat ini juga terus berjalan dengan baik didukung dengan adanya kesepakatan kedua negara yang masih terus dibahas dalam pertemuan-pertemuan yang sudah ataupun akan dilaksanakan.¹¹

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terpadat keempat di dunia dengan jumlah penduduk 237,56 juta pada tahun 2010, dan diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 254,22 juta pada tahun 2020. Sementara Turki memiliki jumlah penduduk sebesar 73,72 juta. Hubungan perdagangan dan ekonomi antara Indonesia dengan Turki yang komprehensif (Indonesia – Turki CETP) berpotensi untuk memiliki relevansi dengan kehidupan untuk lebih dari 300 juta orang, mewakili potensi produktif dan pasar yang cukup besar dan kedua hal tersebut dapat terjadi jika adanya pengawasan dari pemerintahan, akademisi, investor, dan masyarakat sipil. Secara ekonomi, Indonesia telah menyumbang 1% dari GDP dunia sebanyak 3000 USD per kapita pada tahun 2010, 0.95% dari perdagangan barang, 0.64% dari ekspor dunia dan

¹¹ “*Turkey- Indonesia Joint Study Group on The Feasibility of A Comprehensive Trade and Economic Partnership Agreement*”
http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180509_joint-study-group-report-for-indonesia-turkey-ctepa.pdf diakses pada 10 September 2019.

impor jasa, 0.28% dari stok investasi asing langsung (FDI) yang masuk dan keluar, dan adanya cadangan devisa sebesar 0.74%.¹²

Sementara, Turki merupakan anggota OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dengan pangsa sebesar 1.12 % dalam GDP dunia dalam USD (GDP per kapita pada tahun 2009 adalah 8.723 USD), 1.0% dalam perdagangan barang dalam lingkup global, 0.7% dalam perdagangan jasa, 0.3% dalam stok FDI masuk dan keluar, dan 0.8% dalam cadangan devisa. Turki dan Indonesia telah membuat kemajuan dalam stabilisasi makroekonomi. Lira Turki dan Rupiah Indonesia telah mengalami stabilisasi nilai tukar dan suku bunga deposito yang jauh lebih tinggi di Turki dibandingkan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah stabil dengan rata-rata antara 4% hingga 6% per tahun yaitu pada tahun 2008 dan 2009, namun meningkat menjadi 6% di tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi Turki mengalami fluktuasi yang cukup kuat, turun dari 9.4% pada 2004 menjadi -4.7% pada 2009, namun mengalami peningkatan hingga 5.5% pada tahun 2010. Investasi dan kegiatan ekspor di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Turki sebagai bagian dari GDP, sementara Turki memiliki sektor pemerintahan yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia yang diukur dalam hal porsi konsumsi pemerintah dalam GDP.¹³

Statistik perdagangan mengungkapkan hubungan ekonomi yang tumbuh antar kedua negara, pada periode antara tahun 2004 dan 2012 ini terbukti bahwa

¹² *Ibid* hal 1-2.

¹³ *Ibid* hal. 2.

volume perdagangan bilateral meningkat rata-rata tahunan 14,8 persen, meningkat dari US\$ 623 juta menjadi US\$ 2,1 miliar. Dari perspektif Turki, angka ini masih rendah dibandingkan dengan perdagangan dengan kekuatan ekonomi Asia lainnya seperti Cina, tetapi dua poin penting harus dibuat. Pertama, pertumbuhan perdagangan Turki dengan Indonesia telah melampaui pertumbuhan keseluruhan volume perdagangan luar negeri negara tersebut, yang selama periode 2004-2012 naik dengan rata-rata tahunan sebesar 11,7 persen. Dengan kata lain, Indonesia adalah pasar yang meningkat untuk Turki. Kedua, sementara Turki memiliki defisit perdagangan dengan Indonesia, kesenjangan menyempit, dengan ekspor tumbuh lebih cepat daripada impor. Antara 2004 dan 2012, ekspor Turki ke Indonesia mencetak peningkatan tahunan rata-rata 20,7 persen, sementara rasio ini adalah 14,1 persen untuk impor. Indonesia mungkin bukan pasar utama bagi Turki saat ini, tetapi jelas merupakan pasar pertumbuhan dimana perusahaan-perusahaan Turki semakin tertarik.¹⁴

Sementara, selama periode 2017 sampai dengan 2019 nilai bilateral perdagangan RI dengan wilayah KJRI Istanbul mencapai diatas 1 miliar dollar AS. Pada tahun 2018, nilai perdagangan bilateral RI-Turki ini mencapai sebesar US\$ 1.152.561.434 yang mana pada tahun 2018 ini mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yang mencapai US\$ 1.278.937.716 dan kembali turun di tahun 2019 menjadi 1.022.291.053. Sementara, nilai ekspor RI ke Turki tahun

¹⁴ Atli, Atlay. "Turkey and Indonesia: Historical Roots, Contemporary Business Links" *Middle East Institute*, 4 November 2013. https://www.mei.edu/publications/turkey-and-indonesia-historical-roots-contemporary-business-links#_ftn6 diakses pada 10 September 2019.

2018 sebesar US\$ 1.015.867.585 atau turun dibandingkan tahun 2017 senilai 1.150.695.460 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi US\$ 799.988.064.¹⁵ Di tahun 2017, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintahan Turki dan Indonesia telah sepakat untuk menandatangani kesepakatan dagang antar kedua negara. Kesepakatan dagang Indonesia-Turki ini dapat menguntungkan kedua negara dengan mengurangi hambatan perdagangan dan diikuti dengan menciptakan iklim yang baik agar dapat mendukung inisiatif mengenai investasi kedua negara. Kesepakatan dagang yang telah ditandatangani ini adalah bagian dari *Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IT-CEPA) dan hingga saat ini perundingan yang membahas mengenai kesepakatan dagang ini telah mencapai putaran keempat. Kesepakatan dagang ini juga didukung dari hubungan bilateral Indonesia dan Turki yang sangat baik sejak 1950 hingga sekarang dan tahun 2016 perdagangan bilateral Indonesia-Turki mencapai 1,3 miliar dollar AS dengan keuntungan yang mencapai US\$ 713.000.¹⁶

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan melihat mengenai perbandingan dari kebijakan ekonomi luar negeri pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang

¹⁵ “Profil Ekonomi RI - Wilayah Kerja KJRI Istanbul 2019”
<https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9Qcm9maWwlmjBOZXJkYWdhbmdhbiUyMFJlJTlwlSUyME1hcm1hcmElMjAyMDE5LUZpbmFsLnBkZg==> hal.3 diakses pada 12 Juni 2020.

¹⁶ “*Indonesia and Turkey Agree To Sign Trade Deal*”
<https://kargo.tech/artikel/indonesia-and-turkey-agree-to-sign-trade-deal/> diakses pada 12 Juni 2020.

Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo terhadap kegiatan ekspor serta impor Indonesia dan Turki. Penulis akan membandingkan kebijakan ekonomi luar negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama masa jabatannya dari tahun 2004 sampai 2014 dan era Presiden Joko Widodo selama masa jabatannya dari tahun 2014 sampai tahun 2019.

Perbandingan kebijakan ekonomi luar negeri SBY dengan Jokowi ini akan disangkutpautkan dengan kegiatan ekspor dan impor Indonesia-Turki yang merupakan perdagangan bilateral dari masing-masing negara. Kebijakan ekonomi luar negeri SBY dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekspor dan impor Indonesia-Turki pada tahun 2004 - 2014 dan kebijakan ekonomi luar negeri Jokowi dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekspor dan impor Indonesia-Turki pada tahun 2014 hingga 2019.

1.2.3 Perumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang menjadi acuan penulis adalah “**Bagaimana dampak kebijakan ekonomi luar negeri antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo terhadap kegiatan ekspor serta impor Indonesia-Turki?**”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbandingan dari kebijakan luar negeri Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo terhadap kegiatan ekspor dan impor Indonesia dengan Turki. Penulis ingin melihat keunggulan dari masing-masing kebijakan ekonomi luar negeri kedua pihak dan pengaruhnya terhadap perkembangan perdagangan bilateral Indonesia dengan Turki selama masa jabatan SBY maupun Jokowi. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui kekurangan dari kegiatan ekspor dan impor Indonesia-Turki baik selama masa kepemimpinan SBY ataupun Jokowi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi pembaca, juga sebagai acuan dan referensi bagi mahasiswa atau akademisi yang memiliki ketertarikan pada bidang ini.

1.4 Kajian Literatur

Berdasarkan tiga jurnal yang akan menjadi sumber dari penulisan kerangka skripsi ini, ketiga bacaan tersebut menjelaskan mengenai hubungan Indonesia dengan Turki. Pada bacaan pertama yang berjudul *Turkey-Indonesia*

Joint Study Group on The Feasibility of A Comprehensive Trade and Economic Partnership Agreement dijelaskan bahwa dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir, Indonesia dan Turki telah mengurangi hambatan yang besar terhadap arus barang, jasa, informasi, dan modal. Indonesia memulai reformasi kebijakan perdagangan dan investasi yang ekstensif pada awal 1980-an yang sementara itu menghasilkan rezim perdagangan dan investasi yang jauh lebih bebas. Banyak tingkat tarif terikat selama Putaran Uruguay GATT, meskipun pada tingkat yang lebih tinggi dari tarif yang diterapkan. Saat menanggapi krisis keuangan 1997-1998, pembatasan perdagangan dan investasi semakin berkurang. Partisipasi dalam integrasi regional, khususnya Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) yang saat ini sedang diubah menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang muncul dari ASEAN.

Demikian juga, Turki juga telah mengalami pemotongan suku bunga dan pembatasan investasi secara sepihak, regional dan global. Mirip dengan Indonesia, Turki juga telah membangun jaringan perjanjian perdagangan yang luas dengan seluruh dunia. Yang sangat relevan dalam hal ini adalah perjanjian *Customs Union* dengan Uni Eropa. Di bawah *Customs Union*, produk-produk Turki diberikan akses bebas bea ke Uni Eropa. Di sisi lainnya, Serikat Bea Cukai (*Customs Union*) mewajibkan Turki untuk mematuhi Tarif Bea Cukai Umum. Karena *Customs Union* dengan Uni Eropa mencakup produk industri dan bagian industri dari Produk Pertanian Olahahan, Turki menetapkan tingkat perlindungan

untuk produk *European Coal and Steel Community* (ECSC) dan produk pertanian secara mandiri.¹⁷

Di bacaan kedua yang berjudul *Turkey and Indonesia From Friendship to Partnership* ini membahas mengenai hubungan Indonesia dengan Turki yang saling bekerjasama. Pada tahun 2000 kunjungan bilateral pada level presiden, perdana menteri dan departemen luar negeri yang terhitung sebanyak dua kali setiap sepuluh tahun. Selama tahun 2000an, jumlah kunjungan meningkat dengan pesat. Perdana menteri Erdogan mengunjungi Indonesia setelah terjadinya gempa bumi dan tsunami pada tahun 2005. Setelah tahun 2005, Indonesia dan Turki bergabung dalam G-20. Indonesia dan Turki meningkatkan strategi untuk kegiatan perekonomian antar negara dengan seluruh anggota yang tergabung dalam G-20. Investasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Turki ini menggunakan bentuk kerja sama *joint venture*. Hubungan kedua negara ini juga dilakukan untuk mempromosikan integrasi ekonomi antar kedua belah negara. Sektor pariwisata, konstruksi, energi, tambang, dan industri pertahanan menjadi sektor yang memiliki potensi untuk melakukan *joint venture* untuk kedua negara.¹⁸

Bacaan ketiga yang berjudul *OECD Economic Surveys: Indonesia 2008 Economic Assessment: Economic Assessment* membahas mengenai keadaan perekonomian Indonesia pada tahun 2004 – 2008. Pada tahun 2004, pertumbuhan

¹⁷ “*Turkey-Indonesia Joint Study Group on The Feasibility of A Comprehensive Trade and Economic Partnership Agreement*”, http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180509_joint-study-group-report-for-indonesia-turkey-ctepa.pdf, diakses pada 10 September 2019.

¹⁸ Selcuk Colakoglu, Arzu Guler, “*Turkey and Indonesia From Friendship to Partnership*” *USAK Policy Brief*, 11 Mei 2011. Diakses pada 20 September 2019.

ekonomi Indonesia mengalami penurunan sejak terjadinya krisis namun muncul kembali untuk meningkatkan dinamisme. GDP yang tumbuh pada rata-rata sebesar 8.1% per-tahun sejak 1989 – 1996, namun mengalami penurunan sebesar 5.1% sejak tahun 2002 – 2006, periode dimana sudah tidak terjadi krisis namun sedang dalam proses penyembuhan agar GDP bisa kembali normal. Kontribusi dari konsumsi secara privat muncul menjadi suatu yang sangat terlihat, terlebih setelah tahun 2004, pada tahun selanjutnya jumlah ekspor dan kegiatan investasi terus mengalami pertumbuhan. Indonesia telah terbuka secara ekonomi, tarif impor telah gagal untuk menjadi stabil sejak tahun 1980-an. Untuk tarif MFN sebesar 7% pada tahun 2006. Rasio perdagangan Indonesia dibandingkan dengan rata-rata 130% dari GDP untuk negara-negara ASEAN sejak tahun 2000 – 2007.¹⁹

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam dunia modern, terdapat interdependensi pada ekonomi nasional yang bervariasi. Perekonomian dunia pada saat ini harus terbuka untuk satu atau negara lainnya. Karena sejatinya sebuah negara tidak dapat secara utuh berdiri sendiri, diperlukan dukungan dan kerjasama dengan negara lainnya. Kemandirian suatu negara disini berarti negara tersebut menggunakan barang dan jasanya untuk dikonsumsi dengan total output yang diproduksi oleh suatu negara.

¹⁹ OECD Economic Surveys, "OECD Economic Surveys: Indonesia 2008 Economic Assessment: Economic Assessment" OECD, 17 Juli 2008. Diakses pada 20 September 2019.

Perdagangan internasional merupakan transformasi komoditas, input dan teknologi yang mana mempromosikan kesejahteraan dalam dua arah. Hal ini memperluas pasar sebuah negara yang tidak hanya dalam negara saja melainkan menyebar pula ke berbagai negara dan dengan meluasnya pasar domestik suatu negara akan menjamin harga menjadi lebih baik melalui ekspor. Setiap negara memang perlu melakukan perdagangan internasional karena setiap negara memiliki kapabilitas yang berbeda-beda dan mereka melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang yang berbeda. Karena setiap negara memiliki keahlian dan spesialisasi terhadap barang produksinya maka dari itu sebuah negara pasti membutuhkan suatu barang yang tidak dapat dihasilkan oleh negaranya, solusi yang dilakukan oleh negara tersebut adalah dengan bekerjasama dengan negara lain yang dapat memenuhi kebutuhan akan barang yang tidak dapat diproduksi oleh mereka sendiri.

Perekonomian berkaitan dengan alokasi yang tepat dan penggunaan sumber daya yang langka secara efisien. Perdagangan internasional juga memperhatikan alokasi sumber daya ekonomi antar negara. Alokasi tersebut dilakukan di pasar dunia melalui perdagangan internasional dengan konsep perdagangan bebas, produk terbaik diproduksi dan dijual di pasar kompetitif, dan manfaat produksi yang efisien seperti kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih rendah tersedia untuk masyarakat global. Salah satu prinsip dasar perdagangan internasional adalah proses jual beli dari suatu negara yang memiliki harga terendah dan menjual barang dan jasanya kepada suatu negara yang

memiliki harga tertinggi. Hal ini dapat membantu negara berkembang untuk mendapatkan peluang untuk mempercepat laju perkembangan ekonomi negaranya. Mereka dapat melakukan impor mesin dan mengadaptasi teknologi asing. Tidak ada negara yang perekonomiannya dapat berdiri sendiri tanpa adanya kegagalan dalam pertumbuhan ekonomi. Negara maju pun membeli bahan baku untuk perindustrian dari negara yang berkembang. Jika setiap negara memproduksi hanya untuk kebutuhan negaranya sendiri, kegiatan produksi dan konsumsi terhadap barang yang ada akan menjadi terbatas.

Perdagangan internasional merupakan jenis perdagangan yang memunculkan perekonomian dunia. Dalam hal ini permintaan dan penawaran suatu harga akan dipengaruhi secara global. Perdagangan secara global ini akan menguntungkan bagi suatu negara karena mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan barang atau jasa yang tidak tersedia di dalam negaranya sendiri. Barang dan jasa yang dibeli dari pasar global disebut sebagai impor, sementara barang dan jasa yang dijual ke berbagai penjuru dunia disebut sebagai ekspor. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara maju menggunakan sumber dayanya secara efektif seperti teknologi, modal, dan tenaga kerja. Perdagangan global memungkinkan berbagai negara untuk berpartisipasi dalam ekonomi global yang dapat mendorong para investor asing.²⁰

²⁰ G.V.Vijayasri, “*The Importance of International Trade in The World*” Andhra University, 2013. <https://pdfs.semanticscholar.org/0c65/06f1ab891cb40206230f6d841cb7e11796a7.pdf> diakses pada 21 September 2019.

Perdagangan internasional juga memiliki andil penting dalam pembentukan GDP di berbagai negara. Berbagai perusahaan dan berbagai negara mencari peluang untuk pertumbuhan ekonomi mereka di luar batas negara asalnya. Dengan demikian, perdagangan internasional dapat menjadi penting untuk bisnis, peningkatan perdagangan internasional selama bertahun-tahun merupakan hasil dari proses globalisasi. Konsumen dan perusahaan pada akhirnya dapat memilih berbagai produk dan layanan dalam jangkauan yang lebih luas. Selain itu, globalisasi juga mengacu pada saling ketergantungannya antar negara yang timbul dari integrasi berbagai aspek ekonomi, seperti perdagangan. Perdagangan internasional dapat merangsang pertumbuhan ekonomi negara-negara yang kini saling terhubung. Globalisasi juga memberikan peluang yang ditawarkan oleh pasar global.

Liberalisme memiliki tiga anggapan berdasarkan perspektif Kantian diantaranya bahwa demokrasi akan menahan diri dalam menggunakan paksaan melawan demokrasi lainnya, perdagangan yang penting secara ekonomi dapat membentuk insentif untuk menciptakan hubungan yang damai, dan organisasi internasional dapat mengatur pengambilan keputusan dengan secara positif mempromosikan perdamaian. Demokrasi juga dikatakan memiliki prinsip dengan menyelesaikan sebuah konflik secara damai dengan negosiasi dan kompromi, tanpa adanya paksaan atau ancaman dengan menggunakan kekerasan. Interaksi komersial yang berkelanjutan menjadi medium dalam komunikasi dimana informasi mengenai kebutuhan dan pilihan dipertukarkan dalam skala yang luas.

Interaksi ini akan menghasilkan hubungan yang saling mengerti, empati dan kesamaan identitas lintas batas negara. Perdagangan bergantung pada ekspektasi damai dari mitra dagang. Konflik kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah dan akan membahayakan pasar dan kegiatan impor serta beresiko terhadap harga suatu barang. Semakin besar kontribusi perdagangan antara kedua negara terhadap ekonomi nasional mereka, semakin kuat basis politik yang memiliki kepentingan dalam menjaga hubungan damai di antara mereka.

Organisasi internasional juga menjadi hal penting dalam teori ini karena organisasi internasional dapat mempromosikan perdamaian melalui organisasi yang dapat membantu dalam penyelesaian konflik, melakukan mediasi di antara partai yang berkonflik, meminimalisir ketidakpastian dengan menyediakan informasi, memisahkan dan melakukan koersi terhadap pelanggaran norma. Organisasi internasional dapat meminimalisir terjadinya sengketa perdagangan. Perdagangan dan perdamaian merupakan kedua hal yang saling berhubungan. Para pedagang akan enggan untuk melakukan kegiatan jual-beli atau melakukan investasi di negara yang secara politik dapat mengganggu aktivitas perdagangan. Dengan demokrasi perjanjian dagang akan lebih dijaga, dan hak properti luar negeri lebih dihargai di bawah hukum yang stabil. Sebaliknya, perdagangan akan mempromosikan kemakmuran bersama, yang mana adanya kontribusi untuk pembangunan dan stabilitas demokrasi. Organisasi internasional pun akan mempromosikan demokrasi, beberapa dari aktivitas ini banyak dilakukan oleh organisasi regional. Organisasi internasional ini juga memelihara perdamaian di

antara anggota-anggota, membantu melakukan mediasi terhadap suatu konflik dan membantu pemerintah dalam membuat komitmen untuk perdamaian dan demokrasi.²¹

Dalam paham liberal, individual merupakan suatu hal yang penting dalam analisis unit dan penuntut hak. Sebuah negara bermain minimal menjadi peran dalam *classical-liberal society* dan domain dari *laissez-faire*, secara prinsip berperan sebagai wasit dalam sengketa antar individu. Peran sebuah negara dibatasi untuk memelihara keadaan politik, sosial, dan perekonomian yang stabil yang mana individu dapat berinteraksi dan mengejar tujuan yang mereka pilih berdasarkan pemikiran konservatif sosial kontemporer. Menurut Immanuel Kant, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tidak perlu dengan menggunakan kekerasan, mengeliminasi sebuah negara atau membentuk sebuah kekaisaran, yang diperlukan adalah sesuatu yang kurang dari itu dengan membentuk sebuah federasi bangsa yang didasari oleh republik sebuah representatif dari demokrasi yang dapat mempertahankan negara yang berdaulat tetap utuh tapi hanya dengan mengubah karakter bersama. Dengan adanya demokrasi sebuah negara akan cenderung lebih damai dan berpegang teguh pada hukum internasional.

Sementara menurut Richard Cobden, ekonomi dan kesejahteraan manusia merupakan hal terpenting bagi para kaum liberal. Perdagangan bebas merupakan bagian dari sistem kapitalis yang menunjukkan pemimpin lebih efektif dan damai

²¹ Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith, “*International Relations Theories: Discipline and Diversity Third Edition*” Oxford University Press, 2013. Hal. 101 – 108.

untuk mencapai suatu kekayaan nasional. Dengan memperluas perdagangan bebas, komunikasi antar manusia juga akan ikut meluas. Hal ini juga akan meningkatkan pertemanan dan pemahaman internasional. Adanya hubungan ekonomi interdependensi dan perdamaian internasional telah menjadi proposisi liberal berulang dalam karya-karya yang akan kita periksa selanjutnya.²²

Kaum Liberal menekankan pada kesejahteraan individu sebagai pembangun fundamental sistem politik yang adil, sistem politik yang ditandai oleh kekuatan yang tidak terkendali, seperti monarki atau sistem pemerintahan yang diktator tidak dapat melindungi kehidupan dan kebebasan warga negaranya. Fokus utama dalam paham liberal ini untuk membangun institusi yang dapat menjaga kebebasan individu dengan membatasi dan memeriksa kekuatan politik. Kaum Liberal fokus pada bagaimana cara untuk mengembangkan sistem politik yang dapat memungkinkan negara melindungi diri dari ancaman asing tanpa mengganggu kebebasan individu warganya. Sarana utama untuk menahan kekuasaan adalah dengan adanya institusi dan norma pada tingkat domestik dan internasional. Di tingkat internasional, organisasi maupun sebuah lembaga membatasi kekuatan negara dengan membangun kerjasama dan menyediakan cara untuk membebaskan biaya pada negara yang melanggar perjanjian internasional. Lembaga ekonomi akan efektif dalam membina kerjasama tersebut karena

²² Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, *“International Relations Theory Fifth Edition”* Pearson Education, Inc., 2012. Hal. 129 – 135.

memberikan manfaat yang besar sehingga dapat diperoleh dari ekonomi interdependensi antar negara.²³

Outward-looking merupakan salah satu kebijakan yang memiliki upaya untuk menyerap teknologi terbaru, mengejar ketertinggalan dan menjadi kompetitif dengan negara-negara industri yang maju. Diperlukan strategi yang ditujukan ke pasar luar negeri untuk membangun industri-industri yang berorientasi ekspor. Strategi *outward-looking* membutuhkan transisi langsung dari kebijakan perdagangan terbuka yang sederhana ke promosi ekspor yang kuat dengan semua cara yang dapat ditoleransi secara internasional. Strategi ini lebih mengarah pada kegiatan ekspor untuk memperluas pasar. Sebaliknya, strategi *inward-looking* merupakan kebijakan yang mengandalkan pasar dalam negeri dan memiliki fokus untuk meningkatkan pasar dalam negeri sampai meninggalkan upaya-upaya menuju penaklukan pasar asing. Produk substitusi impor menjadi kunci dari kebijakan perdagangan dan dipromosikan melalui tarif, subsidi, pembatasan kuantitatif, *exchange controls*, perizinan, maupun tindakan yang lainnya. Proteksi dalam kebijakan ini akan menjadi ekstrim. Kebijakan domestik inflasi dapat diikuti dengan kekhawatiran kecil mengenai dampaknya terhadap perdagangan internasional.²⁴ Industri yang ditargetkan untuk strategi *inward-looking* adalah Industri yang ditargetkan adalah industri yang menyediakan jumlah impor terbesar. Strategi ini juga melibatkan subsidi

²³ Stephen McGlinchey, Rosie Walters, Christian Scheinfulg, "International Relations Theory", E-International Relations Publishing, 2017. Hal. 22-27.

²⁴ Donald B. Keesing. "Outward-Looking Policies and Economic Development." *The Economic Journal* 77, no. 306 (1967): 303-20, Hal. 304-305. Diakses pada 4 Agustus 2020.

besar-besaran dari produsen dalam negeri serta membatasi kegiatan multi-nasional.²⁵

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, yaitu menekankan pada penggambaran, penjelasan dan penafsiran dari data-data yang telah dikumpulkan. Penelitian kualitatif menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik metode penelitian kualitatif dimana menurut Creswell penelitian menekankan pada penggunaan narasi ataupun kalimat untuk menjelaskan tahapan penelitian yang dilakukan. Metode penelitian kualitatif seringkali menggunakan teknik wawancara, studi kasus, serta studi pustaka guna untuk mengumpulkan data penelitian dan data-data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka berbentuk tabel.²⁶

Penulis juga akan menggunakan metode narasi, yaitu metode dengan menggunakan sumber sekunder yang berasal dari buku, laporan, maupun jurnal yang akan membantu penulis dalam mendapatkan data-data yang sesuai dengan topik penelitian ini.²⁷

²⁵ “*Policies to promote development*”

https://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Policies_to_promote_development.html
diakses pada 4 Agustus 2020.

²⁶ Creswell, John. “*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*”
Los Angeles: SAGE Publications, 2009.

²⁷ Umar Suryadi Bakry, “*Metode Penelitian Hubungan Internasional*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), p. 18-19.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan mengambil data yang berasal dari Buku, Jurnal, dan Laporan yang berkaitan dengan topik ini. Selain itu, penulis juga akan memperoleh data dari website resmi seperti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional guna untuk dapat mengetahui data-data atau informasi mengenai hubungan dagang Indonesia dengan Turki beserta kebijakan luar negeri kedua negara.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab 1 berisi **Pendahuluan** yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah (Deskripsi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah), Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab 2 akan membahas **Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia era SBY** beserta **Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia era Jokowi**. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia pada era SBY serta menjelaskan kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia era Joko Widodo.

Bab 3 akan berisi penjelasan mengenai analisis **Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia era SBY dan era Jokowi Dengan Perdagangan Bilateral Indonesia-Turki (2004 - 2019)**. Pada bagian ini, penulis

akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia pada era SBY dan era Jokowi serta dampak dari implementasi kebijakan ekonomi luar negeri tersebut terhadap perdagangan bilateral Indonesia dan Turki selama era kepemimpinan SBY dan Jokowi. Penulis juga akan membandingkan bagaimana perkembangan perdagangan bilateral Indonesia-Turki era SBY dengan Jokowi dan dikaitkan dengan kebijakan ekonomi luar negeri masing-masing.

Bab 4 berisi **Kesimpulan** terkait dengan penelitian penulis.

